

Inefektivitas Komunikasi Publik Pemerintah Dan Peran *The Fifth Estate* Dalam Demokrasi Deliberatif

Raden Wahyu Utomo Martianto

e-mail: raden.wahyu@budiluhur.ac.id

Universitas Budi Luhur, Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12260.

Submitted: 12 Maret 2025 **Revised:** 04 Februari 2025 **Accepted:** 21 April 2025

Accredited Sinta-4 by Kemdikbud: No. 0041/E5.3/HM.01.00/2023

Abstrak

Komunikasi publik yang efektif merupakan elemen fundamental dalam demokrasi deliberatif, yang menekankan diskursus rasional, inklusivitas, dan transparansi dalam pengambilan kebijakan. Namun, di Indonesia, praktik komunikasi publik pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kualitas deliberasi demokratis. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan komunikasi politik pemerintah Indonesia belum efektif dalam membangun demokrasi deliberatif serta menelaah peran *The Fifth Estate* dalam menanggapi praktik komunikasi publik yang tidak deliberatif. Dengan menggunakan metode *Library Research*, penelitian ini menganalisis literatur akademik, kebijakan pemerintah, serta fenomena digital yang berkaitan dengan komunikasi publik dan demokrasi deliberatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik pemerintah Indonesia masih didominasi oleh pola komunikasi *top-down* yang minim partisipasi publik, kurangnya transparansi dalam kebijakan, serta regulasi komunikasi digital yang cenderung membatasi kebebasan berpendapat. Meskipun teknologi digital telah diadopsi dalam komunikasi publik, pendekatannya lebih bersifat instruksional dibandingkan dialogis, sehingga menghambat keterlibatan warga negara dalam proses deliberatif. Di sisi lain, *The Fifth Estate* memainkan peran penting dalam mengoreksi defisit komunikasi publik dengan menyediakan informasi alternatif, mengamplifikasi suara kelompok marjinal, serta memobilisasi aksi kolektif. Namun, keberfungsian *The Fifth Estate* masih dibatasi oleh tantangan seperti disinformasi, polarisasi opini, kesenjangan digital, serta regulasi pemerintah yang membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital. Studi ini berkontribusi dengan memberikan perspektif holistik mengenai interaksi antara komunikasi publik pemerintah dan peran *The Fifth Estate* dalam demokrasi deliberatif di Indonesia. Implikasi praktis dari penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan komunikasi publik yang lebih transparan dan dialogis, sehingga memungkinkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Selain itu, peningkatan literasi digital harus difokuskan pada kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi disinformasi dan memahami dinamika ruang digital, serta memperkuat mekanisme verifikasi informasi, baik melalui peraturan pemerintah, inisiatif *platform* digital, dan kolaborasi dengan jurnalisme independen sebagai salah satu aktor *The Fifth Estate*, juga merupakan langkah penting untuk mengurangi dampak misinformasi dan polarisasi.

Kata kunci: Demokrasi deliberatif, komunikasi publik, media sosial, partisipasi digital, *The Fifth Estate*

Abstract

Effective public communication is a fundamental element in deliberative democracy, which emphasizes rational discourse, inclusivity, and transparency in policy-making. However, in Indonesia, government public communication practices still face various challenges that impede the quality of democratic deliberation. This study aims to explore factors that render the Indonesian government's political communication ineffective in building deliberative democracy and to examine the role of The Fifth Estate in responding to non-deliberative

public communication practices. Using the Library Research method, this research analyzes academic literature, government policies, and digital phenomena related to public communication and deliberative democracy. The findings indicate that the Indonesian government's political communication remains dominated by top-down communication patterns with minimal public participation, lack of transparency in policies, and digital communication regulations that tend to restrict freedom of expression. Although digital technology has been adopted in public communication, the approach is more instructional than dialogical, thus hindering citizen involvement in the deliberative process. On the other hand, The Fifth Estate plays an important role in correcting public communication deficits by providing alternative information, amplifying the voices of marginalized groups, and mobilizing collective action. However, the functioning of The Fifth Estate is still limited by challenges such as disinformation, opinion polarization, digital divide, and government regulations that restrict freedom of expression in digital spaces. This study contributes by providing a holistic perspective on the interaction between government public communication and the role of The Fifth Estate in deliberative democracy in Indonesia. The practical implications of this research affirm the importance of reforming public communication policies to be more transparent and dialogical, enabling public participation in decision-making. Additionally, enhancing digital literacy should focus on people's ability to identify disinformation and understand digital space dynamics, as well as strengthening information verification mechanisms, whether through government regulations, digital platform initiatives, and collaboration with independent journalism as one of the actors of The Fifth Estate, which are also important steps to reduce the impact of misinformation and polarization.

Keywords: *Deliberative democracy, public communication, social media, digital participation, The Fifth Estate*

PENDAHULUAN

Teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam komunikasi publik di lanskap demokrasi kontemporer. Konsep *Demokrasi Deliberatif* yang dikemukakan oleh Habermas (1991) (Susen, 2018) menekankan pentingnya komunikasi yang rasional dan inklusif dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, meskipun demokrasi mengharuskan keterbukaan pemerintah terhadap partisipasi publik, komunikasi publik di banyak negara, termasuk Indonesia, masih mengalami inefektivitas dalam menciptakan deliberasi yang efektif. Chambers (2023) menyoroti bahwa "fragmentasi ruang publik mencegah warga berpartisipasi dalam pembentukan opini politik," sementara Hutchinson (2023) menegaskan bahwa internet telah mengubah "lingkungan informasi yang kita tempati" tetapi juga menyebabkan misinformasi dan polarisasi yang dapat merusak proses demokrasi (Cohen & Fung, 2023).

Merujuk pada konteks tersebut, konsep *The Fifth Estate* (Dutton, 2009) menjadi relevan dalam memahami peran aktor digital dalam komunikasi publik Indonesia. Media sosial menciptakan ruang yang menantang struktur kekuasaan tradisional dan dimanfaatkan oleh aktor digital untuk mempertanyakan narasi pemerintah (Aytac, 2022; Sergeeva, 2023). Namun, *platform* digital juga menghadapi tantangan serius, seperti algoritma yang memperkuat polarisasi politik (Aytac, 2022) dan regulasi pemerintah yang membatasi kebebasan berpendapat (Schlumberger et al., 2023; Yilmaz, 2023).

Situasi ini semakin kompleks dengan kehadiran rezim otoriter digital yang menggunakan teknologi untuk mempertahankan kontrol politik (Schlumberger et al., 2023; Yilmaz, 2023). Pendekatan *top-down* dalam komunikasi pemerintah Indonesia mencerminkan praktik otoriter digital (Yilmaz, 2023) sementara digitalisasi justru menimbulkan kesadaran politik sekaligus

ketidakpercayaan publik (Shevchenko, 2022). Dalam kondisi ini, *The Fifth Estate* menjadi faktor penting dalam mendorong lingkungan politik yang lebih terbuka (Joyce et al., 2023).

Beberapa kasus konkret mengenai permasalahan komunikasi publik di Indonesia dapat ditelaah pada kasus Revisi UU ITE yang diklaim untuk memperbaiki ketidakpastian hukum, tetapi justru mempersempit ruang kebebasan berpendapat di internet (Aditya & Al-Fatih, 2021). Kemudian kasus komunikasi pemerintah terkait proyek Ibu Kota Negara (IKN) dikritik karena kurangnya transparansi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan (Nugroho & Setijaningrum, 2023). Dan tentu saja kebijakan ekonomi seperti penyesuaian harga BBM dan strategi pemulihan pasca-pandemi tidak disertai strategi komunikasi deliberatif, sehingga memicu resistensi publik (Aziz, 2022).

Terkait fenomena tersebut, kajian mengenai inefektivitas komunikasi publik pemerintah menjadi semakin relevan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: (1) Mengapa komunikasi publik pemerintah Indonesia masih belum efektif dalam membangun demokrasi deliberatif? Selain itu, (2) Bagaimana *The Fifth Estate* berperan dalam menanggapi praktik komunikasi publik yang tidak deliberatif ini? Penelitian ini akan mengeksplorasi hambatan komunikasi publik pemerintah, sekaligus menelaah bagaimana aktor digital berkontribusi dalam mengkritisi dan mendisrupsi narasi politik yang dominan. Dengan menggunakan pendekatan *Library Research*, studi ini akan menganalisis dinamika komunikasi publik di Indonesia melalui kajian literatur dan penelitian terdahulu, guna memahami lebih dalam relasi antara pemerintah, publik, dan aktor digital dalam ruang demokrasi kontemporer.

Komunikasi publik yang efektif sangat penting dalam membangun musyawarah publik yang partisipatif, tetapi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan di beberapa sektor, mulai dari pendekatan *top-down* yang mengabaikan mekanisme umpan balik inklusif, padahal ini adalah elemen kunci dalam *Demokrasi Deliberatif* (Gusman & Syofyan, 2023; Oktavia, 2022), lalu rendahnya partisipasi politik, terutama dalam pemilu, yang bisa diperbaiki dengan media penyiaran yang memberikan informasi seimbang (Syafii et al., 2023), kemudian media digital yang membuka peluang komunikasi publik lebih efektif, tetapi masih menghadapi tantangan dalam penerapannya di Indonesia (Nofiard, 2022). Hingga inkonsistensi regulasi dan keterbatasan kapasitas warga yang membatasi keterlibatan publik dalam pembentukan kebijakan (Oktavia, 2022).

Konsep *The Fifth Estate* menunjukkan potensi media sosial dalam menumbuhkan wacana politik yang lebih beragam, tetapi juga menghadapi tantangan besar. Jurnalis independen dan aktivis dapat mengimbangi narasi pemerintah, tetapi efektivitas *platform* digital terhambat oleh regulasi represif, manipulasi informasi, dan polarisasi opini dalam ruang digital (Hodzi & Zihnioglu, 2023; Hutchinson, 2023; Schulze et al., 2023)

Meskipun berbagai penelitian telah membahas komunikasi publik pemerintah dan *The Fifth Estate*, masih terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai bagaimana inefektivitas komunikasi pemerintah berinteraksi dengan fenomena *The Fifth Estate* di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti aspek komunikasi pemerintah dan digitalisasi secara terpisah. Studi adopsi Web 2.0 oleh pemerintah daerah menekankan keterlibatan warga, tetapi kurang membahas

pengaruh media digital terhadap persepsi publik (Adnan et al., 2021). Studi tentang kontrol media mengungkap kesenjangan dalam pemahaman adaptasi strategi komunikasi pemerintah (Masduki, 2021). Investigasi *e-government* menekankan peran media sosial dalam membangun kepercayaan, tetapi mengabaikan dampak polarisasi digital (Danaditya et al., 2022; Hutahaean et al., 2023). Komunikasi tidak efektif mengurangi dukungan publik terhadap kebijakan (Reynolds et al., 2020). Kesenjangan komunikasi antar tingkat pemerintahan memperburuk ketidakpercayaan publik dan menghambat implementasi kebijakan (Lal et al., 2023; Zou, 2024). Media berperan penting membentuk persepsi publik dan mendorong akuntabilitas, meski tantangan misinformasi dan ketimpangan akses tetap ada (Abdulahabovich, 2022; Zou, 2024). Interaksi antara kegagalan komunikasi pemerintah dan munculnya wacana kontra menunjukkan perlunya strategi untuk meningkatkan keterlibatan publik dan kepercayaan pada pemerintah (Odoom et al., 2023).

Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, penelitian ini menghubungkan bagaimana komunikasi publik pemerintah yang tidak efektif membuka ruang bagi aktor digital untuk mengisi kekosongan wacana dan membentuk oposisi diskursif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif holistik dalam memahami interaksi antara komunikasi negara dan media digital dalam konteks politik kontemporer. Melalui metode *Library Research*, penelitian ini mengkaji literatur akademik, kebijakan pemerintah, dan diskursus digital untuk membangun kerangka analisis komprehensif yang mengidentifikasi kegagalan komunikasi pemerintah dan cara masyarakat dan aktor digital menegosiasikan

narasi politik alternatif dalam ruang publik digital.

Keunikan penelitian ini terletak pada analisisnya pada implikasi komunikasi pemerintah yang tidak efektif terhadap penerimaan kebijakan dan munculnya wacana tandingan melalui media sosial sebagai *The Fifth Estate*. Dalam konteks tersebut, penelitian ini berkontribusi dalam hal berikut: Pertama, mengintegrasikan konsep *Demokrasi Deliberatif* dan *The Fifth Estate* untuk menganalisis komunikasi publik pemerintah Indonesia; Kedua, menelaah peran aktor digital dalam mengisi kekosongan wacana politik akibat kegagalan komunikasi pemerintah, aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya; Ketiga, mengungkap dampak regulasi represif terhadap efektivitas *The Fifth Estate*, terutama dalam konteks digitalisasi politik Indonesia; Dan keempat, menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan komunikasi publik deliberatif di Indonesia, dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi aktor digital.

Meskipun *The Fifth Estate* memiliki potensi besar dalam membentuk wacana demokratis, keterbatasannya mencerminkan masalah sistemik yang memerlukan reformasi mendesak (Abdulahabovich, 2022; Hodzi & Zihnioğlu, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami hubungan antara komunikasi pemerintah, *Demokrasi Deliberatif*, dan *The Fifth Estate* dalam politik digital Indonesia, serta menawarkan perspektif kritis bagi kebijakan komunikasi publik yang lebih demokratis.

Justifikasi penelitian ini adalah urgensinya dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini. UU ITE menyebabkan kriminalisasi kritik dan penguatan kontrol negara atas

informasi. Revisi UU ITE 2016 dikritik karena membatasi kebebasan berekspresi dengan mengkategorikan kritik sebagai ujaran kebencian, memungkinkan sanksi pidana tanpa adanya pihak yang dirugikan (Erfan & Prawesthi, 2023; Octora, 2022). Kerangka hukum ini menciptakan otoritarianisme digital yang membuat jurnalis dan pengguna media sosial berisiko dituntut atas ekspresi *online* (Wiratraman, 2022). Negara juga mengatur perilaku influencer terkait dampak hukum dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran moral (Mahy et al., 2022). Perkembangan ini menunjukkan interaksi antara upaya menjaga ketertiban dan kebebasan demokrasi (Octora, 2022; Winarsasi et al., 2023). Dengan meningkatnya regulasi digital, kriminalisasi kritik, dan kontrol informasi, penting untuk memahami bagaimana komunikasi publik pemerintah memengaruhi kualitas deliberasi publik. Penelitian ini menyediakan wawasan untuk merancang kebijakan komunikasi yang lebih transparan dan partisipatif bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Library Research* dengan memanfaatkan sumber sekunder seperti jurnal, buku, laporan kebijakan, dan dokumen regulasi untuk membangun pemahaman sistematis dan menganalisis inefektivitas komunikasi publik pemerintah Indonesia dalam konteks demokrasi deliberatif dan *The Fifth Estate*. Metode ini dipilih karena kemampuannya mengeksplorasi fenomena kompleks melalui analisis dokumen (Abbott, 2008), yang sesuai untuk kajian komunikasi publik kontemporer. Seperti dinyatakan (Hart, 2018; Wahl et al., 2013), metode ini

memungkinkan integrasi literatur untuk mengidentifikasi pola dalam suatu bidang.

Library Research memanfaatkan sumber sekunder seperti jurnal, buku, laporan kebijakan, dan dokumen regulasi untuk membangun pemahaman sistematis. Penelitian ini mengkaji bagaimana komunikasi pemerintah yang tidak efektif menciptakan celah dalam diskursus politik yang diisi oleh aktor-aktor digital, menganalisisnya melalui teori demokrasi deliberatif dan konsep *The Fifth Estate* untuk memahami interaksi antara komunikasi pemerintah, ruang digital, dan dinamika kekuasaan dalam politik Indonesia.

"Inefektivitas komunikasi publik" merujuk pada kegagalan pemerintah untuk menciptakan pemahaman bersama, memfasilitasi partisipasi publik, dan membangun kepercayaan dalam kebijakan (Sanders & Canel, 2013). Berdasarkan demokrasi deliberatif Habermas (1991), penelitian ini mengevaluasi apakah komunikasi pemerintah Indonesia memenuhi prinsip rasionalitas, inklusivitas, dan kebebasan dari dominasi. Sementara itu, *The Fifth Estate* (Dutton, 2009) dikaji sebagai peran aktor digital independen dalam menantang narasi pemerintah dan membentuk diskursus politik alternatif melalui jurnalis independen, aktivis media sosial, dan komunitas *online*.

Penelitian ini menggunakan sumber sekunder, termasuk artikel jurnal terindeks *Scopus*, *Web of Science*, dan Sinta, serta buku teks akademik tentang komunikasi publik dan demokrasi digital. Dokumen kebijakan pemerintah, regulasi komunikasi publik, serta laporan media dan organisasi independen juga dianalisis guna memahami dinamika komunikasi publik dan respons masyarakat terhadapnya. Pendekatan ini memberikan analisis komprehensif mengenai bagaimana

aktor non-negara berperan dalam membentuk wacana politik di luar kendali pemerintah.

Pencarian dilakukan pada basis data akademik termasuk *Scopus*, *Web of Science*, *SAGE Journals*, *Taylor & Francis Online*, *Google Scholar*, dan *Indonesia OneSearch* dengan menggunakan kombinasi kata kunci berikut:

Tabel 1. Kombinasi Kata Kunci Pencarian Data Literatur

(Sumber: Olahan Peneliti)

No.	Kategori Pencarian	Kata Kunci
1	Primer	“komunikasi publik”; “Indonesia”; “pemerintah”. “negara”
2	Sekunder	“demokrasi deliberatif”; “fifth estate”; “media sosial”; “ruang digital”
3	Tertier	“efektivitas”; “transparansi”; “partisipasi”; “akuntabilitas”

Penelitian ini juga menempatkan kriteria inklusi dan eksklusi data sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Data Literatur

(Sumber: Olahan Peneliti)

No.	Kriteria	Cakupan
1	Inklusi	(1) Publikasi antara 2020-2024
		(2) Berbahasa Indonesia atau Inggris
		(3) Berkaitan dengan komunikasi publik, demokrasi deliberatif, atau ruang digital di Indonesia
		(4) Publikasi dari jurnal peer-reviewed, buku akademik, laporan kebijakan dari lembaga bereputasi, atau dokumen pemerintah resmi.
2	Eksklusi	(1) Publikasi yang tidak tersedia

dalam teks lengkap

- | | |
|-----|---|
| (2) | Literatur populer non-akademis |
| (3) | Studi yang fokus pada negara lain tanpa relevansi komparatif dengan Indonesia |

Seluruh literatur yang diperoleh dari proses pencarian didokumentasikan menggunakan software manajemen referensi Mendeley. Proses seleksi terbagi dalam dua tahap berikut: Pertama, *screening* judul dan abstrak; Kedua, *review* teks lengkap menggunakan aplikasi berbasis *Web AI*, *ChatPDF*. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur terkumpul, guna mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengkontekstualisasikan temuan terkait efektivitas komunikasi publik pemerintah Indonesia dalam perspektif demokrasi deliberatif dan *The Fifth Estate*. Proses analisis menelaah pola, tema, dan argumentasi dari literatur akademik, dokumen kebijakan, dan publikasi media.

Penelitian ini menerapkan *thematic coding* untuk mengelompokkan data berdasarkan tema utama (Braun & Clarke, 2006), seperti strategi komunikasi pemerintah, respons publik, dan peran aktor digital dalam opini politik. Data dikaji secara kritis dengan teori demokrasi deliberatif dan *The Fifth Estate* guna memahami kontribusi komunikasi publik terhadap diskursus politik serta bagaimana inefektivitasnya membuka ruang bagi aktor non-negara memengaruhi wacana politik di Indonesia. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan teori, serta *peer debriefing* oleh akademisi independen guna menilai koherensi analisis. Sesuai dengan Meyrick (2006), reflektivitas penting dalam

penelitian kualitatif untuk menghindari bias seleksi dan interpretasi literatur.

Sebagai studi *Library Research*, penelitian ini bergantung pada literatur sekunder tanpa menghasilkan data primer baru. Batasan lainnya mencakup kemungkinan literatur penting yang terlewat, terutama "literatur abu-abu," serta fokus pada periode 2020-2024 yang dapat mengabaikan aspek historis. Untuk mengatasi hal ini, pencarian tambahan dilakukan pada repositori institusional dan sumber non-konvensional, dengan temuan yang dikontekstualisasikan secara historis (Booth et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi deliberatif menekankan partisipasi inklusif, transparansi, dan pengambilan keputusan yang terinformasi. Di Indonesia, strategi komunikasi publik pemerintah telah berkembang, terutama dengan munculnya teknologi digital. Respons ini mengevaluasi efektivitas strategi ini, menarik wawasan dari berbagai studi dan analisis kasus. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama yaitu 'Mengapa komunikasi publik pemerintah Indonesia masih belum efektif dalam membangun demokrasi deliberatif?', maka kami terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap efektivitas komunikasi publik pemerintah dalam demokrasi deliberatif di Indonesia. Adapun beberapa temuan utama Evaluasi Efektivitas Komunikasi Publik Pemerintah Indonesia kami elaborasikan sebagai berikut:

Tabel 3. Temuan Utama Evaluasi Efektivitas Komunikasi Publik Pemerintah Indonesia
(Sumber: Olahan Peneliti)

Dialog Digital dan Inisiatif Media Sosial

Pemerintah Indonesia telah memanfaatkan media sosial untuk mendorong partisipasi publik. Inisiatif

media sosial pemerintah provinsi yang sukses menunjukkan bagaimana *platform* digital dapat memfasilitasi dialog dan keterlibatan, memastikan suara warga didengar dalam proses pengambilan keputusan (Praratya et al., 2024). Namun, tantangan seperti penggunaan yang tidak konsisten dan jangkauan terbatas di daerah berkembang tetap ada, menyoroti perlunya strategi yang lebih kuat (Atnan & Abrar, 2023).

Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembuatan Kebijakan

Pembentukan ibukota baru Indonesia menggambarkan keberhasilan dan kekurangan. Sementara kebijakan tersebut mematuhi prinsip-prinsip musyawarah, isu-isu seperti transparansi yang tidak memadai dan keterlibatan terbatas dengan masyarakat adat dicatat, menggarisbawahi pentingnya inklusivitas dalam pengambilan keputusan (R. Nugroho & Setijaningrum, 2023).

Peran Literasi dan Kepercayaan Media Sosial

Penelitian menunjukkan bahwa literasi media sosial dan kepercayaan secara signifikan mempengaruhi perilaku komunikasi publik. Sementara faktor-faktor ini umumnya positif di daerah perkotaan, kualitas informasi tidak selalu memengaruhi perilaku, menunjukkan perlunya strategi konten yang lebih baik (Atnan & Abrar, 2023).

E-Government dan Partisipasi Digital

Inisiatif *e-government* Indonesia telah meningkatkan transparansi dan partisipasi, namun tantangan seperti kesenjangan digital dan inefisiensi birokrasi menghambat efektivitasnya. Mengatasi masalah ini sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan keterlibatan (Herawati et al., 2024; Nurhidayat et al., 2024).

Strategi Komunikasi Pandemi COVID-19

Selama pandemi, komunikasi publik berbasis digital memainkan peran penting. Penggunaan *platform* digital dan pesan yang konsisten oleh Pemerintah Kabupaten Sleman secara efektif mencontohkan praktik terbaik, meskipun tantangan dalam komunikasi krisis tetap ada (Musdalifah et al., 2023; Nurjanah, 2023).

Inovasi Pemerintah Daerah dalam Demokrasi Delegatif

Pendekatan inovatif, seperti Musrenbang di Bandung, menunjukkan potensi demokrasi deliberatif di tingkat lokal. Inisiatif ini meningkatkan partisipasi tetapi menghadapi tantangan seperti representasi yang tidak memadai dan kendala birokrasi (Karman et al., 2022; Tresiana et al., 2023).

Komunikasi publik dan Keterlibatan Sipil

Strategi komunikasi publik, termasuk yang ada di media sosial, telah memobilisasi warga dan meningkatkan keterlibatan. Namun, kesenjangan digital dan kualitas informasi tetap menjadi hambatan signifikan untuk partisipasi yang efektif (Čabraja, 2022; Flew & Panjaitan, 2018).

Kelanjutan dari proses evaluasi tersebut penelitian ini berusaha mendeskripsikan tantangan dan rekomendasi untuk meminimalisir dampak inefektivitas komunikasi publik, dengan harapan komunikasi publik pemerintah Indonesia dapat berjalan lebih efektif sehingga semakin mendekati cita-cira demokrasi deliberatif. Berikut tantangan dan rekomendasi yang menjadi bagian temuan dari proses evaluasi terhadap efektivitas komunikasi publik pemerintah dalam demokrasi deliberatif di Indonesia.

Tabel 4. Tantangan dan Rekomendasi Komunikasi Publik
(Sumber: Olahan Peneliti)

Mengatasi Pemisahan Digital

Menjembatani kesenjangan digital sangat penting untuk partisipasi inklusif. Investasi dalam infrastruktur TIK dan program literasi digital dapat meningkatkan akses dan keterlibatan (Herawati et al., 2024; Nurhidayat et al., 2024).

Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan

Transparansi dalam komunikasi pemerintah membangun kepercayaan. Pembaruan rutin dan proses pengambilan keputusan inklusif dapat

mendorong warga negara yang lebih terlibat (Ernungtyas & Boer, 2023; R. Nugroho & Setijanigrum, 2023)

Meningkatkan Kualitas dan Strategi Konten

Informasi yang berkualitas tinggi dan relevan sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Menyesuaikan konten untuk audiens yang beragam dan memastikan akurasi dapat meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan (Atnan & Abrar, 2023; Nurjanah, 2023).

Memperkuat Kapasitas Kelembagaan

Kerangka kerja kelembagaan yang kuat dan personel yang terampil diperlukan untuk efektivitas berkelanjutan. Pelatihan dan alokasi sumber daya dapat mendukung strategi komunikasi yang lebih baik (Susanti et al., 2023; Wahyuni et al., 2023).

Keberhasilan komunikasi publik pemerintah dalam demokrasi deliberatif Indonesia terbukti dalam keberhasilan inisiatif digital dan mekanisme partisipatif. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, masalah transparansi, dan strategi yang tidak konsisten menghambat kemajuan. Mengatasi ini melalui peningkatan infrastruktur, transparansi, dan konten strategis akan meningkatkan demokrasi deliberatif dan keterlibatan warga negara.

Peran *The Fifth Estate* dalam Menyeimbangkan Wacana Politik di Indonesia

Pertanyaan kedua penelitian ini adalah ‘Bagaimana *The Fifth Estate* berperan dalam menanggapi praktik komunikasi publik yang tidak deliberatif ini?’ Untuk itu penelusuran literatur yang dilakukan dengan analisis yang berfokus pada Peran *The Fifth Estate* dalam menyeimbangkan wacana politik di Indonesia. *The Fifth Estate*, sebuah konsep yang telah muncul di era digital, mengacu pada kekuatan kolektif individu berjejaring dan *platform* digital yang menantang institusi tradisional dan

meningkatkan akuntabilitas demokrasi. Di Indonesia, fenomena ini telah mendapatkan daya tarik yang signifikan, terutama melalui penggunaan media sosial, aktivisme *online*, dan jurnalisme warga. Bagian ini mengeksplorasi peran *Fifth Estate* dalam menyeimbangkan wacana politik di Indonesia, dengan temuan literatur yang digunakan untuk meneliti kemunculan *The Fifth Estate*, mekanisme utama, tantangan, dan implikasinya bagi demokrasi.

Kemunculan *The Fifth Estate* adalah sebagai produk dari revolusi digital, yang telah mengubah cara individu terlibat dengan proses politik. Di Indonesia, kebangkitan *The Fifth Estate* dapat dikaitkan dengan proliferasi penggunaan internet dan media sosial, yang telah memberdayakan warga negara untuk berpartisipasi dalam wacana politik (Dutton & Dubois, 2023; Heyberger, 2023). Pergeseran ini sangat signifikan di negara di mana media tradisional sering dikritik karena bias dan

representasi terbatas dari suara-suara terpinggirkan (I. D. Astuti, 2022)

The Fifth Estate di Indonesia dicirikan oleh sifatnya yang terdesentralisasi dan jaringan, memungkinkan individu dan kelompok untuk melewati penjaga gerbang informasi tradisional. Hal ini telah membuka peluang munculnya bentuk-bentuk baru partisipasi politik, seperti aktivisme digital, protes *online*, dan jurnalisme warga (Y. Nugroho, 2011; Wahyuningroem et al., 2023). Misalnya, gerakan seperti #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw telah menunjukkan kekuatan *The Fifth Estate* dalam memobilisasi opini publik dan mempengaruhi keputusan kebijakan (Wahyuningroem et al., 2023).

Adapun temuan untuk mekanisme utama dan tantangan bagi *The Fifth Estate* di Indonesia terklasifikasi seperti pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Mekanisme Utama dan Tantangan *The Fifth Estate* di Indonesia
(Sumber: Olahan Peneliti)

Mekanisme/Tantangan	Deskripsi	Sitasi Data
Penyebaran Informasi	Memungkinkan penyebaran informasi yang mungkin diabaikan oleh media tradisional.	(Heyberger, 2023) (Dutton & Dutton, 2007)
Amplifikasi Suara Terpinggirkan	Menyediakan <i>platform</i> bagi komunitas yang terpinggirkan untuk menyuarakan keprihatinan mereka	(Astuti, 2022)
Mobilisasi Jaringan	Memfasilitasi organisasi dan koordinasi tindakan kolektif.	(Fuadi, 2020)
Demokrasi deliberatif	Mempromosikan debat publik dan diskusi tentang isu-isu politik.	(Hussain et al., 2023) (Astuti, 2016)
Informasi yang berlebihan dan informasi yang salah	Berisiko penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi opini publik.	(Evanalia, 2022)
Masalah Privasi dan Keamanan	Kerentanan aktivis dan warga negara terhadap pelecehan dan pengawasan.	(Heyberger, 2023) (Dutton & Dutton, 2007)
Tantangan Regulasi	Peraturan pemerintah yang dapat menghambat kebebasan berekspresi.	(Nugroho, 2020) (Revolusi, 2024)
<i>Digital Divide</i>	Batasi partisipasi dalam wacana politik digital untuk kelompok-kelompok tertentu.	(Chairunisa et al., 2024)

Berdasarkan data literatur pada tabel 5 dapat dijelaskan, bagaimana mekanisme *The Fifth Estate* bekerja di Indonesia. *The Fifth Estate* beroperasi melalui beberapa mekanisme kunci yang berkontribusi dalam menyeimbangkan wacana politik di Indonesia. Pertama, melalui diseminasi informasi dan akuntabilitas, *The Fifth Estate* memungkinkan penyebaran informasi yang mungkin diabaikan oleh media tradisional, sangat penting dalam meminta pertanggungjawaban kekuasaan, seperti yang terlihat dalam paparan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia (Dutton & Dutton, 2007; Heyberger, 2023). Kedua, *The Fifth Estate* berperan dalam amplifikasi suara terpinggirkan, menyediakan *platform* bagi kelompok-kelompok yang sering diabaikan oleh media tradisional yang cenderung berfokus pada sumber-sumber elit, seperti yang dicontohkan oleh *platform* jurnalisisme warga Bale Bengong (I. D. Astuti, 2022). Ketiga, *The Fifth Estate* memfasilitasi mobilisasi jaringan dengan mengkoordinasikan tindakan kolektif melalui media sosial, sebagaimana terlihat dalam gerakan #GejayanMemanggil yang berhasil memobilisasi ribuan orang di Yogyakarta (Fuadi, 2020). Keempat, *The Fifth Estate* mempromosikan demokrasi deliberatif dengan menciptakan ruang untuk debat dan diskusi publik, menjadikan *platform* media sosial sebagai arena di mana warga dapat terlibat dengan isu-isu politik, berbagi informasi, dan mempengaruhi opini publik (P. A. A. Astuti, 2016; Hussain et al., 2023).

Beberapa tantangan yang dihadapi *The Fifth Estate* di Indonesia terlepas dari potensinya, dapat merusak efektivitasnya. Kelebihan informasi dan kesalahan informasi menjadi masalah serius, di mana sifat terdesentralisasi dari *The Fifth Estate*

menimbulkan kekhawatiran tentang penyebaran informasi yang salah dan tipuan, sangat bermasalah dalam konteks kampanye politik yang dapat mempengaruhi opini publik dan merusak kepercayaan dalam proses demokrasi (Evanalia, 2022). Masalah privasi dan keamanan juga menjadi tantangan, di mana penggunaan *platform* digital untuk aktivisme politik menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan pengawasan, membuat aktivis dan warga negara yang terlibat dalam kegiatan politik *online* rentan terhadap pelecehan, sensor, dan bentuk represi lainnya (Dutton & Dutton, 2007; Heyberger, 2023). Tantangan regulasi muncul dari berbagai peraturan pemerintah Indonesia yang bertujuan mengendalikan konten *online*, yang telah dikritik karena potensinya menghambat kebebasan berekspresi dan kemampuan *The Fifth Estate* untuk beroperasi secara efektif (A. A. Nugroho, 2020; Revolusi, 2024). Kesenjangan digital juga menjadi hambatan signifikan, karena *The Fifth Estate* tidak dapat diakses secara setara oleh semua warga negara, terutama dengan adanya kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan yang membatasi partisipasi kelompok-kelompok tertentu dalam wacana politik digital (Chairunisa et al., 2024)

Implikasi untuk Pemerintahan Demokratis

Merujuk pada paparan sebelumnya dapat dikatakan bahwa *The Fifth Estate* memiliki implikasi yang signifikan bagi pemerintahan demokratis di Indonesia. Dengan memberdayakan warga negara dan menyediakan jalan baru untuk partisipasi politik, ia memiliki potensi untuk memperdalam demokrasi dan meningkatkan akuntabilitas. Namun, tantangan yang dihadapi

juga menyoroti perlunya pertimbangan cermat terhadap perannya dalam ranah politik yang lebih luas.

The Fifth Estate mewakili perbatasan baru dalam wacana politik di Indonesia, menawarkan peluang untuk keterlibatan dan akuntabilitas warga yang lebih besar. Namun, kualitasnya tergantung pada penanganan tantangan yang dihadapi, termasuk informasi yang salah, masalah privasi, rintangan peraturan, dan kesenjangan digital. Ketika Indonesia terus menavigasi kompleksitas politik digital, *The Fifth Estate* memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam membentuk masa depan pemerintahan demokratis.

Inefektivitas Komunikasi Publik Pemerintah dalam Membangun Demokrasi Deliberatif

Komunikasi publik efektif merupakan elemen kunci dalam demokrasi deliberatif (Hardiman, 2019), namun komunikasi publik pemerintah Indonesia belum mencapai kualitas yang optimal. Beberapa faktor penghambat utama teridentifikasi dalam penelitian ini. Komunikasi pemerintah masih didominasi pola *top-down*, lebih bersifat sosialisasi kebijakan daripada deliberasi publik aktif (Gusman & Syofyan, 2023). Dalam kebijakan strategis seperti UU Cipta Kerja dan pemindahan ibu kota, pemerintah cenderung hanya menyampaikan informasi tanpa menyediakan ruang dialog bermakna, sehingga menimbulkan resistensi dan ketidakpercayaan publik (R. Nugroho & Setijaningrum, 2023).

Komunikasi publik pemerintah juga menghadapi tantangan transparansi dan partisipasi. Meski inisiatif *e-government* telah diperkenalkan, efektivitasnya terhambat birokrasi kompleks dan kesenjangan akses

teknologi (Herawati et al., 2024; Nurhidayat et al., 2024). Regulasi komunikasi digital seperti UU ITE dan kebijakan penyensoran konten cenderung membatasi ruang deliberatif digital (Aditya & Al-Fatih, 2021).

Rendahnya literasi media dan keterbatasan mekanisme umpan balik juga menjadi kendala. Masyarakat sulit membedakan informasi kredibel, dan cenderung reaktif terhadap wacana yang dikendalikan kelompok kepentingan tertentu (Atnan & Abrar, 2023). Mekanisme umpan balik sering hanya bersifat prosedural tanpa implementasi konkret dalam pengambilan keputusan (Oktavia, 2022).

Peran *The Fifth Estate* dalam Menanggapi Praktik Komunikasi Publik yang Tidak Deliberatif

The Fifth Estate—aktor digital independen seperti jurnalis warga, akademisi, dan aktivis—berperan sebagai mekanisme kontrol yang menyeimbangkan wacana politik tidak deliberatif (Dutton, 2009). *The Fifth Estate* berfungsi sebagai penyedia informasi alternatif yang berlawanan dengan narasi resmi pemerintah. Media digital independen mengoreksi defisit komunikasi pemerintah dengan menyebarkan analisis kritis terkait kebijakan kontroversial (Dutton & Dubois, 2023). Contohnya, kampanye #TolakOmnibusLaw membangun opini publik yang menyoroti ketidaktransparanan legislasi dan dampaknya terhadap pekerja (Wahyuningroem et al., 2023).

The Fifth Estate memperkuat demokrasi dengan mengamplifikasi suara kelompok terpinggirkan. Masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan komunitas sipil kini dapat menggunakan *platform* digital untuk

menyuarakan kepentingan mereka (I. D. Astuti, 2022). *The Fifth Estate* juga memobilisasi gerakan sosial dan aksi kolektif, seperti #ReformasiDikorupsi dan #GejayanMemanggil (Fuadi, 2020). Ruang digital yang diciptakan *The Fifth Estate* menjadi alternatif ruang deliberatif yang lebih inklusif. Diskusi publik melalui *Twitter Spaces*, *YouTube Live*, dan *platform* daring lainnya memungkinkan masyarakat terlibat dalam debat politik yang lebih terbuka (P. A. A. Astuti, 2016; Hussain et al., 2023)

Namun, *The Fifth Estate* menghadapi tantangan seperti penyebaran misinformasi (Evanalia, 2022), kontrol pemerintah melalui regulasi ketat, pemblokiran konten, dan kriminalisasi aktivis digital (A. A. Nugroho, 2020; Revolusi, 2024). Kesenjangan digital juga menjadi isu, di mana kelompok dengan akses internet terbatas tidak memiliki kesempatan sama dalam diskursus politik (Chairunisa et al., 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa komunikasi politik pemerintah Indonesia masih belum mendukung demokrasi deliberatif. Faktor utama penyebabnya meliputi pola komunikasi *top-down* yang minim partisipasi, transparansi kebijakan yang terbatas, regulasi digital yang menghambat diskursus publik, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Meski teknologi digital telah diadopsi, komunikasi pemerintah tetap instruksional, bukan dialogis, sehingga partisipasi publik dalam kebijakan masih terbatas.

The Fifth Estate berperan sebagai mekanisme kontrol sosial dengan menyediakan informasi alternatif, mengamplifikasi suara kelompok marjinal, memobilisasi aksi kolektif,

dan menciptakan ruang diskusi digital untuk mengurangi defisit komunikasi publik. Namun, dampaknya masih terhambat oleh disinformasi, polarisasi opini, kesenjangan digital, dan regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi. Studi ini menunjukkan bahwa komunikasi politik Indonesia masih mengalami defisit deliberatif, dengan keterbatasan dalam keterbukaan partisipasi dan tantangan struktural bagi *The Fifth Estate* dalam menyeimbangkan wacana publik. Untuk memperkuat demokrasi deliberatif, pemerintah perlu menerapkan strategi komunikasi yang lebih partisipatif, transparan, dan responsif. Reformasi regulasi digital harus mendukung kebebasan berekspresi tanpa menghambat diskursus sehat, sementara literasi digital publik perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih kritis dalam menyaring informasi. *The Fifth Estate* juga harus memperkuat verifikasi informasi untuk mengurangi misinformasi dan polarisasi.

Sebagai kajian pustaka, penelitian ini masih terbatas dalam eksplorasi data empiris. Oleh karena itu, studi selanjutnya akan melakukan observasi langsung terhadap aktor-aktor *The Fifth Estate* di Indonesia, termasuk jurnalis independen, aktivis media sosial, dan komunitas digital, guna memahami lebih dalam dinamika komunikasi politik digital serta strategi dalam membangun demokrasi deliberatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, A. (2008). The Traditional Future: A Computational Theory of Library Research. *College & Research Libraries*, 69(6), 524–545. <https://doi.org/10.5860/CRL.69.6.524>
- Abdulahovich, V. V. (2022). Social media as the fifth estate. *AFinLA:N Vuosikirja*, 414–433. <https://doi.org/10.30661/afinlavk.114457>

- Aditya, Z. F., & Al-Fatih, S. (2021). Indonesian constitutional rights: expressing and purposing opinions on the internet. *The International Journal of Human Rights*, 25(9), 1395–1419.
- Adnan, H. R., Hidayanto, A. N., & Kurnia, S. (2021). Citizens' or Government's Will? Exploration of Why Indonesia's Local Governments Adopt Technologies for Open Government. *Sustainability*, 13(20), 11197. <https://doi.org/10.3390/SU132011197>
- Astuti, I. D. (2022). Jurnalisme Warga sebagai Fifth Estate: Potret Kaum Marginal di Bale Bengong. *Ettisal : Journal of Communication*, 7(2), 1–16. <https://doi.org/10.21111/ejoc.v7i2.8140>
- Astuti, P. A. A. (2016). Freedom of Expression through Social Media and the Political Participation of Young Voters: A Case Study of Elections in Jakarta, Indonesia. *SOCRATES: An International, Multi-Lingual, Multi-Disciplinary, Refereed, Indexed Scholarly Journal*, 4(4), 74–88.
- Atnan, N., & Abrar, A. N. (2023). Relation of Social Media Literacy, Trust, and Information Quality on Public Communication Behaviour in Urban Local Government Social Media in Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 39(2), 210–226. <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2023-3902-12>
- Aytac, U. (2022). Digital Domination: Social Media and Contestatory Democracy. *Political Studies*, 003232172210965–003232172210965. <https://doi.org/10.1177/00323217221096564>
- Aziz, A. (2022). Strengthening Data-Driven Policy Communication On Indonesia Economic Recovery Program Of Covid-19 In The Digital Landscape. *Jurnal Media Dan Komunikasi Indonesia*, 3(2), 128. <https://doi.org/10.22146/jmki.70426>
- Booth, A., James, M.-S., Clowes, M., & Sutton, A. (2021). *Systematic approaches to a successful literature review*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Čabraja, T. (2022). Political Communication and Deliberative Democracy. *Economic Themes*, 60(4), 441–457. <https://doi.org/10.2478/ethemes-2022-0024>
- Chairunisa, P., Batubara, D. P., Saragih, O. A., & Ivanna, J. (2024). Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Candirejo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang. *Journal on Education*, 6(4), 20592–20598. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6122>
- Chambers, S. (2023). Deliberative democracy and the digital public sphere: Asymmetrical fragmentation as a political not a technological problem. *Constellations: An International Journal of Critical & Democratic Theory*, 30(1).
- Cohen, J., & Fung, A. (2023). Democratic responsibility in the digital public sphere. *Constellations: An International Journal of Critical & Democratic Theory*, 30(1).
- Danaditya, A., Ng, L. H. X., & Carley, K. M. (2022). From curious hashtags to polarized effect: profiling coordinated actions in Indonesian twitter discourse. *Social Network Analysis and Mining*, 12(1). <https://doi.org/10.1007/s13278-022-00936-2>
- Dutton, W. H. (2009). The fifth estate emerging through the network of networks. *Prometheus*, 27(1), 1–15.
- Dutton, W. H., & Dubois, E. (2023). *The Fifth Estate: a new source of democratic accountability* (pp. 272–326). <https://doi.org/10.4337/9781800377585.00029>
- Dutton, W. H., & Dutton, W. H. (2007). Through the Network (of Networks) – the Fifth Estate. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.1134502>
- Erfan, M., & Prawesthi, W. (2023). *The implementation of criminal act towards hate*

- speech in social media.* 75–86.
<https://doi.org/10.56943/jcj.v2i1.280>
- Ernungtyas, N. F., & Boer, R. F. (2023). The Citizen Trust and Engagement in Indonesia Government's Social Media and Website. *Mediator*, 16(1).
<https://doi.org/10.29313/mediator.v16i1.2159>
- Evanalia, S. (2022). Peran Jurnalisme Media Sosial dalam Mewujudkan Demokrasi Indonesia di Era Post Truth. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 32–43. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.86>
- Flew, T., & Panjaitan, R. P. (2018). Shifting Conceptions of Voice in Citizen–Government Interactions Using Digital Media in Indonesian Local Democracy 1. In *Digitizing democracy* (pp. 56–71). taylorfrancis.com.
<https://doi.org/10.4324/9781351054867-7>
- Fuadi, A. (2020). *Social media power for protest in Indonesia: The Yogyakarta's #gejayanmemanggil case study.* 4(3), 541–552. <https://doi.org/10.25139/JSK.V4I3.2438>
- Gusman, D., & Syofyan, Y. (2023). Public Participation In Legislation (Legal Comparison Studies In Indonesia, South Africa, And United State). *Nagari Law Review*, 6(2), 133.
<https://doi.org/10.25077/nalrev.v.6.i.2.p.133-145.2023>
- Hardiman, F. B. (2019). *Demokrasi deliberatif: menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas* (Priotomo, Ed.; 8th ed.). Kanisius. www.kanisiusmedia.com
- Hart, C. (2018). *Doing a literature review: Releasing the research imagination.* Sage Publications Ltd.
- Herawati, A. R., Widowati, N., & Shahirah, N. (2024). The Role of E-Governance in Shaping Political Ideologies within Online Media in Indonesia: A Comprehensive Review. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*, 258–269.
<https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.685>
- Heyberger, B. (2023). *The Fifth Estate.*
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190688363.01.0001>
- Hodzi, O., & Zihnioğlu, Ö. (2023). Beyond ‘networked individuals’: social-media and citizen-led accountability in political protests. *Third World Quarterly*, 1–18.
<https://doi.org/10.1080/01436597.2023.2219213>
- Hussain, M. K. I., Farooq, H., & Iqbal, D. N. (2023). *A Qualitative Study of Exploring the Impact of Social Media on Political Participation.*
<https://doi.org/10.55529/jmcc.36.11.21>
- Hutahaean, M., Eunike, I. J., & Silalahi, A. D. K. (2023). Do Social Media, Good Governance, and Public Trust Increase Citizens' e-Government Participation? Dual Approach of PLS-SEM and fsQCA. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2023, 1–19.
<https://doi.org/10.1155/2023/9988602>
- Hutchinson, J. (2023). Democracy in the digital era. *Policy & Internet*, 15(2), 158–161.
<https://doi.org/10.1002/poi3.349>
- Joyce, S. C., Umney, C. R., Whittaker, X., & Stuart, M. (2023). New social relations of digital technology and the future of work: Beyond technological determinism. *New Technology Work and Employment.*
<https://doi.org/10.1111/ntwe.12276>
- Karman, M. M., Yazid, S., & Widian, R. (2022). Deliberative Democracy in Action: The Case of Musrenbang in Bandung, Indonesia. *Asian International Studies Review*, 23(1), 113–136.
- Lal, H., Singh, H. S., & Gupta, D. Das. (2023). Assessing Communication Gaps: An In-depth Analysis of Government-Public Interactions at the National, State, and District Levels. *International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology.*
<https://doi.org/10.17148/iarjset.2023.10940>
- Mahy, P., Winarnita, M., & Herriman, N. (2022). *Influencing the influencers: Regulating the*

- morality of online conduct in Indonesia. 14(3), 574–596. <https://doi.org/10.1002/poi3.321>*
- Masduki. (2021). Media Control in the Digital Politics of Indonesia. *Media and Communication, 9(4), 52–61. <https://doi.org/10.17645/MAC.V9I4.4225>*
- Meyrick, J. (2006). What is good qualitative research? A first step towards a comprehensive approach to judging rigour/quality. *Journal of Health Psychology, 11(5), 799–808.*
- Musdalifah, F. S., Nasyaya, A., & Santoso, A. (2023). Digital Voices in Early Days: Analysing Local Government Social Media Approaches to Risk Communication during the Initial Stages of the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 39(4), 126–149. <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2023-3904-07>*
- Nofiard, F. (2022). Komunikasi Politik Digital di Indonesia. *Alhiwar : Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah, 10(2), 31. <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v10i2.7548>*
- Nugroho, A. A. (2020). *Effect of digital community towards democracy process: digital partisipation analysis in indonesia. 15(2). <https://doi.org/10.32834/GG.V15I2.123>*
- Nugroho, R., & Setijaningrum, E. (2023). Indonesia's New Capital: An Analysis Of Transparency, Public Participation, And Deliberative Democracy. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture, 35, 1842–1874.*
- Nugroho, Y. (2011). *Citizens in @action: Collaboration, participatory democracy and freedom of information? Mapping contemporary civic activism and the use of new social media in Indonesia.*
- Nurhidayat, N., Nurmandi, A., & Congge, U. (2024). Bridging the digital divide: analyzing public participation in Indonesia's e-government through the e-participation index. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14(2), 298–481. <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i2.14435>*
- Nurjanah, A. (2023). Digital-Based Public Communication of Public Relations of the Sleman Regency Government During the COVID-19 Pandemic. *Aristo, 11(2), 348–370. <https://doi.org/10.24269/ars.v11i2.6767>*
- Octora, R. (2022). Criminalization of the Action of Submitting Criticism to The Government Based on The Electronic Information and Transaction Law in Indonesia, And Protection of The Right to Freedom of Speech in A Democratic Country. *International Journal of Social Science and Human Research, 05(05). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i5-46>*
- Odoom, D., Mensah, E. O., Frempong, F. A., Dick-Sagoe, C., & Agyepong, L. (2023). Assessing the Effectiveness of Government Communication on Public Policy in Ghana: The Case of Planting for Food and Jobs Policy. *PanAfrican Journal of Governance and Development. <https://doi.org/10.46404/panjogov.v4i2.4850>*
- Oktavia, M. O. (2022). Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurist-Diction, 5(4), 1419–1434. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37337>*
- Praratya, A., Sukmayadi, V., & Kamil, D. N. G. (2024). Fostering Digital Dialogue: A Case Study of Government Social Media Initiatives in Advocating Social Participation. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 40(2), 362–379. <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2024-4002-21>*
- Revolusi, P. R. (2024). Persepsi publik dan media sosial dalam kampanye digital pilpres 2024. *NIVEDANA. <https://doi.org/10.53565/nivedana.v5i1.1177>*
- Reynolds, J. P., Stautz, K., Pilling, M., Linden, S. van der, & Marteau, T. M. (2020). Communicating the effectiveness and ineffectiveness of government policies and their impact on public support: a systematic review with meta-analysis. *Royal Society*

- Open Science*, 7(1), 190522.
<https://doi.org/10.1098/RSOS.190522>
- Sanders, K., & Canel, M. J. (2013). *Government communication: Cases and challenges*. Bloomsbury academic.
- Schlumberger, O., Edel, M., Maati, A. H., & Saglam, K. (2023). How Authoritarianism Transforms: A Framework for the Study of Digital Dictatorship. *Government and Opposition*, 1–23.
<https://doi.org/10.1017/gov.2023.20>
- Schulze, H., Hohner, J., & Rieger, D. K. (2023). Ambassadors of ideology: A conceptualization and computational investigation of far-right influencers, their networking structures, and communication practices. *New Media & Society*, 146144482311644.
<https://doi.org/10.1177/14614448231164409>
- Sergeeva, Z. N. (2023). Social media as a new institutional structure for communication. *Society and Security Insights*, 6(1), 56–65.
[https://doi.org/10.14258/ssi\(2023\)1-03](https://doi.org/10.14258/ssi(2023)1-03)
- Shevchenko, L. E. (2022). Transformation of socio-political communication in the context of the digitalization of society. *Gumanitarij Ūga Rossii*, 11(6), 191–200.
<https://doi.org/10.18522/2227-8656.2022.6.11>
- Susanti, T., Anom, E., & Iswadi, I. (2023). Optimizing Public Communication in the Digital Era: A Case Study of the Ministry of Communication and Information Technology in Indonesia. *Channel*, 11(2), 144–149.
<https://doi.org/10.12928/channel.v11i2.468>
- Susen, S. (2018). *Jürgen Habermas: Between democratic deliberation and deliberative democracy*.
- Syafii, A., Rohimi, U. E., Shobichah, S., Atikah, N., & Rani, P. (2023). Broadcasting Communications In Encouraging Public Participation In Elections. *Journal Of World Science*, 2(4), 571–575.
- Tresiana, N., Duadji, N., Pairulsyah, Suwarno, & Damayantie, A. (2023). Deliberative Democracy Innovations at Citizen Level: Challenges of Local Government in Indonesia. *Journal of Local Self-Government*.
[https://doi.org/10.4335/21.4.807-832\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.4.807-832(2023))
- Wahl, D., Avery, B. F., & Henry, L. (2013). Studying Distance Students: Methods, Findings, Actions. *Journal of Library & Information Services in Distance Learning*, 7(1), 183–209.
<https://doi.org/10.1080/1533290X.2012.705656>
- Wahyuni, H. I., Fitrah, A. A., Eprilianto, D. F., & Mardalena, I. (2023). Technology, transparency, and collaboration/integration: Analysis of digital government problems from public communication perspective during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Information Polity*, 1–19.
<https://doi.org/10.3233/ip-211545>
- Wahyuningroem, S. L., Sirait, R., Uljanatunnisa, U., & Heryadi, D. (2023). Youth political participation and digital movement in Indonesia: the case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw. *F1000Research*, 12, 543.
<https://doi.org/10.12688/f1000research.122669.1>
- Winarsasi, P. A., Thalib, M. C., & Moha, M. R. (2023). State Control Of Electronic Information Resources: Role And Efforts In The Modern Context. *Jurnal Pamator*, 16(2), 405–418.
<https://doi.org/10.21107/pamator.v16i2.20234>
- Wiratraman, H. P. (2022). *Indonesian law systematically stifles journalists*.
<https://doi.org/10.54377/5bae-669e>
- Yilmaz, I. (2023). The Nexus of Digital Authoritarianism and Religious Populism. *Religions*, 14(6), 747.
<https://doi.org/10.3390/rel14060747>
- Zou, Y. (2024). Take India as an example to explore the role of media in policy communication. *Journal of Education*,

Humanities and Social Sciences, 42, 919–924.

<https://doi.org/10.54097/h0w56908>